

Pendampingan Masyarakat dalam Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Pedak Baru, Bantul

Paulus Bawole & Haryati Sutanto

Universitas Kristen Duta Wacana Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 – 25, Yogyakarta 55224

paulus@staff.ukdw.ac.id & haryati@staff.ukdw.ac.id

Received 20 Oktober 2023; Revised -; Accepted for Publication 14 November 2023; Published 29 November 2023

Abstract — *Architectural works of poor communities in informal settlements are often recognized as Marginalized Architecture, because indeed the people who create the Architecture is in these settlements are people who are marginalized by the social strata of urban society. They develop the house according to their needs and abilities. Methods of development, planning and design as well as the use of building materials are often very suitable for the needs of the local community, the local climate and even according to their daily income. In SDGs 2030 it is hoped that the settlements of these marginal communities can be eliminated. One of the marginal settlements in Bantul Regency is located in Kampung Pedak Baru, Bangun Tapan Village. The situation of marginal settlements developed on the banks of the Gajahwong river needs to be developed. Through community assistance conducted by lecturers from Duta Wacana Christian University, community-based slum settlement planning was carried out. With a totally participatory planning model, this community service program can be implemented well together with the team KOTAKU program supported by the Bantul Regency regional government. As a result of the total participatory model in planning slum development, the people of Kampung Pedak Baru are satisfied because they were involved in the planning process. Apart from that, currently the Bantul Regency Government is still negotiating with the Central Government to finance the implementation of the slum area development plan in Kampung Pedak Baru.*

Keywords — *Marginal Settlements, Slums, Participatory, Environmental, Development*

Abstrak— Karya arsitektur masyarakat miskin di permukiman informal seringkali diakui sebagai Arsitektur Marjinal, karena memang yang menciptakan Arsitektur di permukiman tersebut adalah orang-orang yang terpinggirkan oleh strata sosial masyarakat perkotaan. Mereka mengembangkan rumah sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Metode pembangunan, perencanaan dan perancangan serta penggunaan bahan bangunan seringkali sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, iklim setempat bahkan sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Dalam SDGs 2030 diharapkan permukiman masyarakat marginal tersebut dapat dihilangkan. Salah satu permukiman marginal di Kabupaten Bantul terletak di Kampung Pedak Baru, Desa Bangun Tapan. Situasi permukiman marginal yang berkembang di bantaran sungai Gajahwong perlu dikembangkan. Melalui pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Kristen Duta Wacana, dilakukan perencanaan permukiman kumuh berbasis komunitas. Dengan model perencanaan yang benar-benar partisipatif, program pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik bersama tim program KOTAKU yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Berkat model partisipatif total dalam perencanaan pembangunan kawasan kumuh, masyarakat Kampung Pedak Baru merasa puas karena dilibatkan dalam proses perencanaan. Selain itu, saat ini Pemkab Bantul masih melakukan

negosiasi dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai pelaksanaan rencana pengembangan kawasan kumuh di Kampung Pedak Baru.

Kata Kunci— *Permukiman Marjinal, Kumuh, Partisipatif, Lingkungan, Pengembangan*

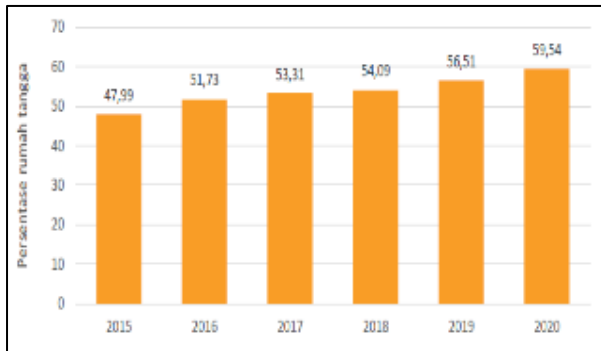
PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia tetap melaksanakan agenda pembangunan dan dalam waktu yang sama juga memenuhi komitmen pembangunan dunia. Prinsip-prinsip *universality, integration*, dan *“No One Left Behind”* tetap diterapkan dalam setiap periode pembangunan di Indonesia. Berdasarkan agenda Rencana Aksi Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) 2021 -2024 ke tujuh belas target SDGs beserta indikatornya terefleksi dalam agenda pembangunan nasional. Dari 17 target SDGs yang terkait dengan penataan permukiman masyarakat marjinal pada kota-kota di Indonesia adalah target nomer 1 - Tanpa Kemiskinan; nomer 2 - Tanpa Kelaparan; nomer 6 – Air Minum dan Sanitasi Layak; dan nomer 11 – Kota dan Permukiman yang berkelanjutan.[1]

Salah satu program penataan permukiman di Indonesia yang sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir adalah program Kota Tanpa Kumuh yang disingkat dengan KOTAKU. Program Kotaku atau *National Slum Upgrading Project (NSUP)*/ Program Kota Tanpa Kumuh (Program KOTAKU) mulai dilaksanakan tahun 2016. Program ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk merealisasikan amanat RPJMN 2015-2019. Program Kotaku ini dilaksanakan di 269 Kota dan Kabupaten yang diimplementasikan di lebih dari 11.000 wilayah Kelurahan. Program KOTAKU ini didukung oleh lembaga multi-donor seperti Bank Dunia (WB), Bang Pembangunan Islam (IsDB), dan Bank Pembangunan Asia (AIIB). Secara manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memimpin Unit Pengelola Kolaborasi Pusat (CCMU) di bawah Satuan Tugas Nasional (Pokja Nasional PPAS), sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bertindak sebagai Unit Pengelola.[2]

Paska program KOTAKU yang diakhiri pada tahun 2022, pemerintah daerah diharapkan melanjutkan program penataan permukiman kumuh di wilayahnya masing-masing dengan biaya dari APBD tingkat Kota/Kabupaten atau/dan tingkat Propinsi, maupun dana dari APBN. Salah satu wilayah Kabupaten di DI Yogyakarta yang melanjutkan program Kota tanpa kumuh adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Wilayah yang dikembangkan merupakan wilayah-wilayah kumuh yang belum selesai secara tuntas. Pada pelaksanaan program inilah pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan. Lokasi pendampingan masyarakat untuk perencanaan

penataan permukiman kumuh adalah wilayah yang masuk dalam SK Bupati No. 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Bantul.



Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Sumber: BPS diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Pada wilayah Kabupaten Bantul diimplementasikan juga program Kotaku untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Capaian pengurangan kumuh sampai tahun 2022 adalah 147,72 Ha. Sampai saat ini luasan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Bantul masih tersisa 182,54 Ha. Dari keseluruhan wilayah Kumuh di Kabupaten Bantul ada 15,25 Ha wilayah kumuh yang ada di Kelurahan Banguntapan.

Wilayah perkotaan Yogyakarta atau *The Greater Yogyakarta* merupakan perkembangan daerah *suburb* sebagai akibat perluasan kota Yogyakarta yang terus menerus berkembang kawasan terbangunnya. Wilayah *the Greater Yogyakarta* terdiri dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta serta sebagian Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang meliputi beberapa Kecamatan termasuk Kecamatan Banguntapan. (Lihat gambar 2) Kepadatan Penduduk terpusat di kawasan perkotaan Kabupaten Bantul: Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan dengan kepadatan penduduk 3201-4000 jiwa/km².



Gambar 2. Kawasan *the Greater Yogyakarta*
Sumber: BPS diolah Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Perkembangan wilayah permukiman masyarakat berpenghasilan rendah terus berkembang pada daerah-daerah yang tidak strategis, rawan bencana, dan sering kali daerah-daerah yang dianggap tidak bertuan atau ilegal.[3] Salah satu wilayah berkembang di daerah perbatasan antara kota dan kabupaten Bantul yang menjadi lokasi permukiman marjinal masyarakat berpenghasilan rendah adalah wilayah Kelurahan Banguntapan, tepatnya berada di Kampung Pedak Baru. Permukiman marjinal di Kampung Pedak Baru berkembang di tepi sungai Gajahwong yang keadaannya lokasi lahannya kurang strategis dan rawan terhadap bencana. Kondisi permukiman marjinal yang dikembangkan masyarakat berpenghasilan rendah sudah semakin padat dengan kawasan terbangun (*Built Up Area*). Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya eksisting permukiman yang mendesak ke area sungai Gajahwong pada sisi barat Kampung Pedak Baru.

Kondisi permukiman marjinal di wilayah Kampung Pedak Baru, Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul merupakan permukiman yang padat dan tidak teratur, tidak memiliki ruang dan jalur mitigasi bencana karena keterbatasan akses permukiman.[4] Perkembangan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah ini berada di sepanjang tepi sungai Gajahwong yang sangat rawan terjadinya bencana banjir. Menurut informasi dari masyarakat setempat hampir setiap tahun kawasan permukiman tempat tinggal mereka terdampak bencana banjir.[5] Pada saat terjadi banjir masyarakat setempat mengungsi pada tetangga mereka yang berada pada wilayah yang lebih tinggi. Kondisi permukiman di Kampung Pedak Baru dapat dilihat pada foto dokumentasi di bawah ini.



Gambar 3. Dokumentasi Foto Permukiman Tepi Sungai Gajahwong di wilayah Kampung Pedak Baru, Kelurahan Banguntapan, Bantul, DIY

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

Dengan keadaan permukiman yang sering terdampak banjir dan keadaan yang cukup kumuh, masyarakat di Kampung Pedak baru sangat terbuka untuk mengembangkan permukiman mereka menjadi lebih layak dan aman dari ancaman bencana banjir. Dengan adanya program pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Bantul yang didukung oleh rekan-rekan tim Kotaku bersama staf dosen dari Universitas Kristen Duta Wacana, masyarakat dengan antusias mendukung dan teribat langsung dalam melakukan

survey lapangan, memberikan informasi saat diinterview mengenai kehidupan mereka sehari-hari dengan segala kebutuhannya. Selain itu dalam proses membuat alternatif rancangan permukiman yang lebih layak masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dalam memberikan ide penataan ruang edngan menggunakan maket permukiman secara 3 dimensi.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi potensi dan sumberdaya kampung kota di kawasan tepi sungai Gajahwong.[6] Lokasi pengabdian berada di Kampung Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara pada narasumber terpilih (tokoh masyarakat dan pengampu kebijakan).[7]



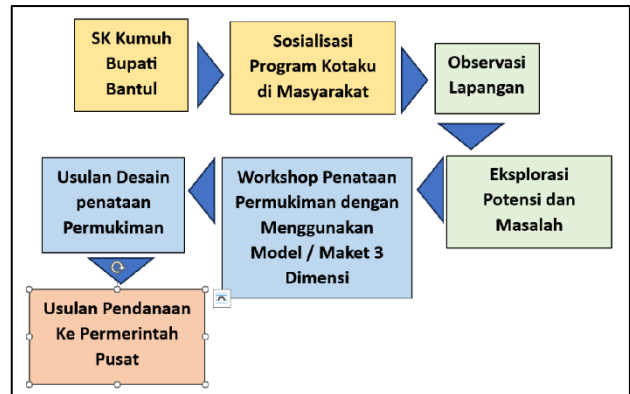
Gambar 4. Lokasi Pengabdian di Pedukuhan Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul yang berada di sepanjang tepi sungai Gajahwong beserta foto situasi saat permukiman dalam keadaan kering dan banjir

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

Eksplorasi dalam pengabdian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu: Tahap pertama ialah persiapan penelitian merupakan kegiatan awal dilakukan pemetaan lokasi penelitian yaitu peta permukiman di Kampung Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Bantul. Tahap kedua ialah pelaksanaan pengabdian yang dilakukan setelah pemetaan selesai dan dilanjutkan obsevasi lapangan dan wawancara mendalam dengan responden kepala rumah tangga di level mikro yaitu di RT 15, 16, dan 18 yang berada di sepanjang tepi sungai Gajahwong untuk mengetahui lebih detail data fisik perkembangan permukiman formal dan informal. Tahap ketiga, pasca pelaksanaan yaitu pengolahan data dilakukan setelah kegiatan lapangan yang dilanjutkan dengan membuat alternatif perancangan bersama masyarakat.

Proses perencanaan berawal dari SK Bupati No. . 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Bantul zang merujuk Kawasan

Kampung Pedak Baru menjadi salah satu wilayah Kampung Kumuh di Kabupaten Bantul. Berdasarkan SK Bupati tersebut sosialisasi program dilaksanakan di Kampung Pedak Baru yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Pada saat sosialisasi ada banyak diskusi dengan masyarakat terkait dengan perkembangan Kampung Kumuh di Pedak Baru. Setelah masyarakat memahami maksud program, observasi lapangan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat setempat. (Lihat Gambar 5.)



Gambar 5. Diagram Proses Pendampingan Masyarakat Dalam Perencanaan Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil obeservasi masyarakat kemudian di diskusikan untuk mengeksplorasi permasalahan dan potensi yang ada pada wilayah Kampung Pedak Baru. Setelah permasalahan dan potensi didapatkan , secara bersama-sama masyarakat, tim pengabdian dari UKDW, dan tim Kokot Kotaku Bantul melakukan workshop perencanaan di wilayah Kampung Pedak baru. Workshop ini diikuti perwakilan ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda dengan cukup aktif dan antusias untuk memberikan ide-ide solusi penataan permukiman kumuh di Kampung Pedak baru, Setelah itu proses mengembangka usulan desain dilakukan oleh Tim Korkot Kotaku Bantu besama-sama dengan Tim PKM dari UKDW. Langkah terakhir yang dilakukan adalah mengajukan usulan pendanaan pada pemerintah pusat di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusikan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan pada wilayah Kampung Pedak Baru, Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul akan dijelaskan mulai dari survey awal, melakukan pengukran, diskusi bersama masyarakat, sampai dengan usulan alternatif desain diberikan. Survey awal dilakukan untuk mendapatkan data primer keadaan permukiman marjinal dan berusaha mengenal beberapa tokoh masyarakat untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat setempat.

Dari hasil kunjungan lapangan didapatkan informasi tentang keadaan fisik permukiman di Kampung Pedak Baru yang kualitas lingkungannya sangat buruk. Beberapa keadaan fisik di wilayah Kampung Pedak Baru yang buruk dapat dikelompokkan menjadi fasilitas sarana - prasarana dan Ketidakteraturan Bangunan. Kelompok-kelompok fasilitas tersebut antara lain:

➤ Jaringan Pembuangan Limbah

Lokasi merupakan level terendah dari permukiman di sekitarnya sehingga tidak terjangkau oleh jaringan infrastruktur/ Sistem Jaringan Kota.

➤ Ketidakteraturan Bangunan

Permukiman padat dan rawan terhadap bencana. Hanya 70% bangunan hunian memiliki akses >1,5 meter.

➤ Saprass Persampahan

Tidak memiliki akses yang memadai sistem persampahan untuk bisa sampai ke lokasi permukiman.

➤ Jalan & Drainase

Kualitas dan lebar jalan tidak standar. Jaringan jalan tidak terhubung satu sama lain. Jalan sebagian besar belum dilengkapi drainase.



Gambar 5. Kualitas Jalan dan Drainage di Kampung Pedak Baru, Kalurahan Bangun Tapan, Bantul

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

➤ Saprass Proteksi Kebakaran

Tidak terjangkau oleh sarana prasarana proteksi kebakaran karena akses yang tidak menunjang.

➤ Kualitas Air minum tidak layak

Air minum tidak higienis karena mengandung bakteri Ecolli yang cukup tinggi

A. Pengumpulan Data

Kawasan perkotaan dan Arsitektur saling bergantung, berinteraksi dalam desain dan renovasi. Mereka dapat digambarkan sebagai wajah dan latar belakang terbentuknya kota.[8] Bangunan secara individual dapat digabungkan satu dengan yang lainnya menjadi latar belakang atau diekspos sebagai suatu figur kota. Sebagai identitas pertumbuhan perkotaan di kota-kota besar, Arsitektur Marjinal dapat dikenali dari beberapa aspek.[9] Dalam PkM ini akan dijelaskan Arsitektur Marjinal dengan membahas ciri-ciri bentuk kampung perkotaan.

Sifat permukiman formal pada umumnya mempunyai pola yang sesuai dengan rencana yang dikembangkan sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan permukiman informal berkembang secara sporadis tanpa adanya perencanaan dan otomatis pola tata ruang permukiman menjadi tidak beraturan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan di permukiman berpendapatan rendah

dipinggirkan oleh masyarakat di permukiman formal; masyarakat miskin hidup tanpa status hukum; dan kualitas lingkungan di sekitar perumahan mereka juga buruk. Keadaan ini menjadi gambaran permukiman Marjinal di Kampung Pedak Baru, Bantul.

Proses pengumpulan data dilakukan bersama-sama dengan masyarakat baik melalui wawancara langsung dengan masyarakat maupun melakukan pengukuran di lapangan. Pada Gambar 6 terlihat dokumentasi foto pada saat pengukuran di lapangan. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui lebar jalan existing, ketinggian bangunan yang terdampak banjir, posisi rumah-rumah yang nantinya dikepras untuk memperlebar jalan kampung yang sering dilalui masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 6. Pengukuran failitas permukiman yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat setempat

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

Ruang terbuka pada permukiman informal di Kampung Pedak baru terbentuk secara spontan, karena rumah-rumah yang ada di kawasan permukiman kumuh ini dibangun tanpa adanya perencanaan.[10] Meskipun ruang terbuka di kawasan permukiman ini tidak memiliki pola dan bentuk tertentu, namun masyarakat memanfaatkannya dengan sangat efektif. Dari beberapa observasi lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa situasi di ruang terbuka publik atau jalan daerah/ kampung yang dapat menstimulus aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah tersedianya ruang terbuka yang dijadikan orientasi beberapa rumah. Dengan orientasi sebagian rumah pada ruang terbuka, banyak masyarakat yang melakukan komunikasi dan interaksi sosial di ruang terbuka tersebut.[11]

Umumnya ruang terbuka yang dijadikan orientasi pada beberapa rumah akan dimanfaatkan secara luas oleh anak-anak, remaja, remaja, dan dewasa. Mereka memanfaatkan ruang terbuka di dalam pemukiman dengan "Time Sharing". Stimulus aktivitas masyarakat lainnya adalah tersedianya sarana prasarana teknis di ruang terbuka, seperti kran air umum, sumur gali umum, serta sarana prasarana sosial seperti pos jaga, warung, musholla, dan lain-lain yang menjadi tempat masyarakat melakukan interaksi sosial dan komunikasi diantara mereka.[12]

Penataan ruang pada rumah mempunyai banyak variasi; mulai dari rumah yang hanya mempunyai satu ruangan hingga rumah yang ruangnya terbagi menjadi beberapa tipe ruangan.[13] Secara umum ruang dalam rumah di kawasan permukiman Kampung Pedak Baru terbagi menjadi ruang

publik seperti teras, dan ruang tamu yang terletak di bagian depan rumah; ruang semi publik seperti kamar tidur dan ruang makan di tengah; dan ruang privat seperti dapur, kamar mandi, dan toilet yang terletak di sisi belakang rumah. Masyarakat akar rumput memanfaatkan ruangan-ruangan di dalam rumahnya dengan sangat fleksibel, karena terbatasnya ruang yang mereka miliki di dalam rumah; misalnya: mereka menggunakan ruang tamu sebagai ruang makan atau mungkin mereka menggunakan ruang makan sebagai ruang kamar tidur atau ruang bermain anak.[14] Bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas yang tinggal di kawasan Kampung Pedak baru, ketika memiliki anggota keluarga yang banyak, maka mereka akan memanfaatkan ruangan yang ada secara lebih intensif dan sangat fleksibel seperti masyarakat akar rumput.

B. Proses Perencanaan Berbasis Masyarakat

Pemahaman terhadap total partisipatif pada penelitian berbasis masyarakat di pemukiman informal Kampung Pedak Baru adalah proses mempelajari keadaan social-budaya masyarakat yang terpinggirkan di pemukiman secara total beserta dengan produk-produk spatial dan arsitektural yang diciptakan secara spontan. Dikatakan secara total karena peneliti sama sekali tidak melakukan penilaian baik terhadap kehidupan social-budaya masyarakatnya maupun bentuk fisik spatial dan arsitektural yang diciptakan mereka. Proses ini dilakukan dengan terlibat langsung menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di permukiman Kampung Pedak Baru. Dengan memahami sekaligus mengalami kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di pemukiman Kampung Pedak Baru ada banyak temuan-temuan positif yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai strategi mengembangkan pemukiman informal. Selain itu hal-hal yang sifatnya negative dikonfermasikan kembali pada masyarakat dan secara bertahap didiskusikan kembali dengan masyarakat untuk mencari solusi yang akan dilakukan. [15]

Dengan memahami kehidupan sehari-hari masyarakat berpenghasilan rendah pada permukiman informal Kampung Pedak Baru, bisa dipahami pada pukul berapa saja masyarakat setempat memanfaatkan ruang-ruang spatial informal secara intensive.[16] Selain itu karakter aktivitas yang dilakukan pada *public space* informal juga dapat dipahami dengan baik. Kasus-kasus yang sering terjadi sebagai kreativitas masyarakat dalam mensiasati keterbatasan ruang adalah melakukan *time sharing* atau pembagian waktu aktivitas dalam satu ruang yang sama dan *public vs private* atau usaha masyarakat yang tidak mempunyai ruang luar private untuk mengubah ruang umum sebagai milik private. Kasus *public vs private* sering dilakukan dengan memperpanjang atap rumah sampai pada jalam umum di depan rumah mereka. Pada kasus ruang terbuka umum di tepi sungai pada wilayah kampung Pedak Baru dapat dilihat perbedaan karakter ruang pada saat pagi hari dan sore hari. Pada pagi hari ruang luar di tepi sungai hanya dipergunakan oleh ibu-ibu untuk mencuci pakaian dan pada saat sore hari ruang luar yang sama banyak dimanfaatkan baik oleh ibu-ibu untuk mencuci pakaian, anak-anak bermain dan pemuda-pemudi berolah raga. Dengan demikian total partisipatif

dengan melakukan survey intensif sangat diperlukan untuk melakukan penelitian di permukiman informal.[17]

Setelah melakukan survey lapangan bersama dengan masyarakat, maka pemahaman terhadap situasi permukiman marjinal di Kampung Pedak Baru dapat digambar baik secara dua dimensi dalam bentuk peta maupun tiga dimensi dalam bentuk maket. Pada proses awal masyarakat diberi gambaran situasi permukiman melalui paparan powerpoint. Setelah itu proses eksplorasi permasalahan yang dihadapi masyarakat didiskusikan bersama. Beberapa bagian permukiman dapat diidentifikasi kualitas buruknya dan didiskusikan solusinya. Setelah itu masyarakat dibagi dalam kelompok dan diberi peta lokasi existing permukiman Kampung Pedak Baru yang sudah dipetakan permasalahannya.

Dengan peta yang sudah diberi tanda permasalahannya, masing-masing kelompok diminta memikirkan solusi yang baru dihadapi dengan membuat maket model perumahan yang ditata kembali oleh masyarakat. Pada saat membuat maket permukiman tersebut masyarakat berdiskusi di dalam kelompok secara intensif. Kemudian mereka baru mencari kesepakatan bersama dalam menyusun strategi penataan permukiman yang baru. Setelah masing-masing kelompok sudah mendapatkan kesepakatan bersama, setiap kelompok baru mempresentasikan hasil diskusi mereka dihadapan kelompok yang lainnya.

Pada Gambar 7 terlihat diskusi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok yang dilanjutkan dengan paparan hasil diskusinya. Pada saat paparan tersebut, didapatkan juga konflik yang berbeda antara solusi dari satu kelompok dan kelompok lainnya. Pada saat itu masing-masing kelompok harus berdiskusi mencari kesepakatan bersama sampai ditemukan satu kesepakatan yang disetujui oleh semua kelompok. Setelah itu perencanaan yang memecahkan persalahan yang ada didokumentasikan dan dibuatkan alternatif solusi untuk membangun permukiman kampung kumuh di Kawasan Kampung Pedak Baru. Dengan demikian hasil perencanaan membuat pemukiman menjadi lebih tertata dan akrab terhadap lingkungan serta dapat mengatasi kerawanan terhadap bencana banjir dan kebakaran yang sering kali mengan[19]cam masyarakat yang tinggal di Kampung Pedak Baru, Banguntapan, Bantul.



Gambar 7. Proses Perencanaan Berbasis Masyarakat Dalam Manata Permukiman Marjinal Kampung Pedak baru, Kalurahan Bangun Tapan, Bantul di Sepanjang Sungai Gajahwong.

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

C. Usulan Desain Penatan Permukiman

Setelah proses perencanaan yang dilakukan bersama masyarakat, perancangan kawasan Permukiman Kampung Pedak Baru mulai didiskusikan dan dibuat usulan alternatifnya. Usulan desain yang dibuat mempunyai kriteria yang memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Beberapa solusi yang diberikan untuk memecahkan permasalahan dapat dijelaskan seperti berikut:

- Penataan permukiman yang layak
- Penataan sirkulasi masyarakat dan jaringan jalan yang terkoneksi
- Perencanaan infrastruktur (sanitasi, drainase, persampahan)
- penyediaan sarana pelayanan umum yang memadai (air minum)
- Penyediaan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau
- Penyediaan akses masuk dan keluar kawasan yang mudah dijangkau
- Penataan koridor sungai gajah wong
- Pengembangan objek wisata sungai dengan dukungan forum penataan sungai gajah wong
- Penyediaan RTH di sempadan rel kereta api
- Pengembangan fasilitas penunjang ecotourism (kulinier, lahan parkir, information center)
- Pengembangan fasilitas penunjang UMKM
- Perencanaan pola mitigasi bencana (rute evakuasi, ruang berkumpul)

Untuk merealisasikan pemecahan solusi di atas, maka visi yang disepakati dalam membangun kawasan Kampung Pedak baru, Kalurahan Bangun Tapan, Bantul adalah menciptakan Kawasan Pedak Baru Sebagai Kawasan *Ecotourism* Berbasis Mitigasi Bencana, yang Layak Huni dan Berkelanjutan” Sedangkan konsep, strategi dan pola penangannya adalah seperti berikut:

- Konsep penataan adalah *kombinasi pemugaran dan peremajaan* yang mengacu pada peta alas hak tanah. Peremajaan berfokus pada beautifikasi/ tampilan fasad bangunan. Dari BPN fokus ke pemetaan IP4T.
- Dalam perencanaan Kawasan Gajahwong sebagai dasar pemilihan konsep tema kawasan, sebagai TRIANGLE meliputi Bantul, Kota Yogyakarta dan Sleman. Tema kawasan mendukung Provinsi DI Yogyakarta sebagai kota wisata, pendidikan, dan budaya.
- Area strategis dekat dengan Kampus UIN Sunan Kalijaga, Museum Affandi, area KAI di selatan rel kereta (*edukasi transportasi*), serta keberadaan kampung sungai untuk edukasi kebencanaan (*banjir sungai*).
- Sehingga Tema kawasan adalah ”*EDU ECOTOURISM*” (*EDUKASI EKOLOGI TURISM*) berbasis mitigasi bencana.

Gambar 8 menjelaskan keadaan Permukiman Kampung Pedak Baru yang sudah dibangun infrastruktur dan

permukimannya. Pada ilustrasi yang diberikan terlihat pembangunan *retaining wall* (dinding penahan tanah) yang mengamankan permukiman dari ancaman bahaya banjir Sungai Gajahwong. Diatas *retaining wall* dibangun jalan inspeksi yang dapat dipergunakan masyarakat untuk jalan kendaraan sepeda motor, sekaligus dapat difungsikan untuk akses membersihkan sungai Gajahwong. Fasilitas pendopo yang dibangun di tengah permukiman menjadi pusat untuk masyarakat melakukan interaksi sosial atau bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan bersama. Selain itu anak-anak juga dapat bermain dengan aman pada ruang terbuka yang ada di sekitar pendopo.

Pada sisi sebelah utara permukiman dibangun jembatan untuk menghubungkan permukiman dengan Universitas swasta yang ada di seberang sungai Gajahwong. Dengan adanya jembatan tersebut masyarakat dapat mengembangkan usaha tempat pondokan (kost) untuk mahasiswa yang kuliah di Universitas swasta yang ada di seberang sungai. Beberapa ruang terbuka juga dibuat di tengah permukiman agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan, sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Jalan-jalan di tengah permukiman dibuat paling kecil selebar 1,5 meter agar existing jalan-jalan sempit di tengah permukiman menjadi lebih lebar lagi. Jalur utama yang mengelilingi permukiman diperlebar menjadi 3 meter, untuk mempermudah *ambulance* masuk apabila ada anggota masyarakat yang sakit atau meninggal dunia. Selain itu dengan lebar jalan 3 meter, mobil pemadam kebakaran dapat masuk ke permukiman untuk mengatasi kebakaran yang mungkin terjadi pada permukiman. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dibangun tersebut masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan tingkat perekonomian masyarakat juga dapat meningkat. Demikian juga dengan kualitas lingkungan yang ada diharapkan akan terus berkelanjutan dengan baik.



Gambar 8. Alternatif Solusi Perencanaan yang Digambarkan Secara Tiga Dimensi (Perspektif) untuk Memberikan Gambaran Permukiman Kampung Pedak Baru Pada Saat Implementasi Perencanaan Dilaksanakan.

Sumber: Dokumentasi Tim Korkot Kotaku Bantul, 2023

KESIMPULAN

Dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan total partisipatif, masyarakat miskin yang tinggal pada pemukiman informal Kampung Pedak Baru benar-benar dilibatkan sebagai subyek yang bersama-sama memikirkan pengembangan permukiman tempat tinggal mereka. Dengan demikian hasil akhir dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat menambah skill dalam hal melakukan observasi, berkomunikasi dan stimulasi pada masyarakat untuk memunculkan ide pemecahan masalah yang mereka hadapi sendiri. Selain itu masyarakat yang tinggal pada permukiman informal Kampung Pedak baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan dimana mereka tinggal dan juga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan segala kemampuan mereka sendiri. Pada kasus untuk melakukan upgrading pada permukiman informal Kampung Pedak Baru, memang keberpihakan pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat mutlak pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal pada permukiman marjinal di kampung Pedak baru, Kelurahan Bangun Tapan, Bantul.

Dengan adanya keberpihakan pada masyarakat miskin, program pemerintah untuk melakukan pengurusan pada pemukiman masyarakat miskin bisa diminimalkan. Program pengurusan pemukiman masyarakat miskin oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai program "Tutup Lobang - Gali Lobang," karena program pengurusan tersebut terlihat memecahkan permasalahan slum pada satu wilayah, tetapi secara tidak langsung program tersebut menciptakan pemukiman slum baru pada wilayah lain. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin yang rumahnya tergusur tetap tidak mampu membeli rumah di perumahan formal yang disediakan oleh pemerintah atau swasta, sehingga mereka terpaksa mencari lahan kosong lain di kota tersebut untuk membuat tempat tinggal ilegal yang baru buat mereka berteduh dan biasanya lokasi yang dipilih tetap berada di sekitar pusat kota dimana mereka bekerja pada sektor informal.

Dampak perubahan fisik permukiman kumuh di Kampung Pedak Baru memang belum bisa terlihat, karena pendanaan pelaksanaan program masih dalam proses seleksi yang dilakukan pemerintah pusat. Walaupun demikian masyarakat setempat sudah merasakan aman tinggal di kawasan Kampung Pedak Baru karena mereka sudah mempunyai perencanaan permukiman yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan adanya perencanaan partisipatif tersebut diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendukung dana pembangunan untuk mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan pada Tim Kota Tanpa Kumuh Bantul beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sampai pada Kelurahan Bangun Tapan yang memberi kesempatan untuk melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu ucapan terima kasih juga diberikan pada rekan-rekan Fakultas arsitektur dan Desain serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Kristen Duta Wacana yang memberikan support baik dalam bentuk finansial maupun dalam dukungan semangat melakukan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] Bappenas, "Rencana Aksi Nasional TPB Tahun 2021-2024," pp. 2021-2024, 2021.
- [2] Direktur, "Laporan Evaluasi Fase I (2017 - 2019) NSUP/Program KOTAKU Wilayah PEndanaan WB/AIIB Oktober 2021," Jakarta, 2021.
- [3] P. Bawole and H. B. Sutanto, "Community empowerment strategy by sustainable built environment planning in Urban Kampong," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 126, no. 1, 2018.
- [4] E. Purwanto, A. Sugiri, and R. Novian, "Determined slum upgrading: A challenge to participatory planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia," *Sustain.*, vol. 9, no. 7, 2017.
- [5] B. Beccari, "A Comparative Analysis of Disaster Risk, Vulnerability and Resilience Composite Indicators," *PLoS Curr.*, pp. 1-38, 2017.
- [6] J. W. Creswell, *Research Design*, 3rd. California 91320: SAGE Publications, Inc., 2009.
- [7] Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, kuantitatif, Mix Methods, serta Research & Development)*, 1st ed. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- [8] E. Y. Danso-wiredu and E. Midheme, "Slum upgrading in developing countries: lessons from Ghana and Kenya," *Ghana J. Geogr.*, vol. 9, no. 1, pp. 88-108, 2017.
- [9] W. D. Ayyubi, Ramon; Wijaya, I Nyoman Suluh; Purnamaasari, "Livability Permukiman Kampung Kota Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang," vol. 9, no. 2, pp. 77-94, 2017.
- [10] Q. Akbar, hiya'ul & Mursadin, "The Effectiveness of Slum Settlement Arrangement in Mentaos Village, Banjarbaru City," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 28, pp. 789-801, 2022.
- [11] W. Li, P. Li, Z. Feng, and C. Xiao, "GIS-Based Modeling of Human Settlement Suitability for the Belt and Road Regions," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 10, 2022.
- [12] M. Indrasari and I. Rudiarto, "Kemampuan Kebertahanan Masyarakat pada Permukiman Rawan Banjir di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *J. Wil. dan Lingkungan.*, vol. 8, no. 2, pp. 116-129, 2020.
- [13] M. W. Akhlaq, Z. S. Chadhar, and J. R. Kataria, "Social And Political Conditions Of Slum Dwellers," vol. 7, no. 5, pp. 294-304, 2023.
- [14] Heryati, "KAMPUNG KOTA SEBAGAI BAGIAN DARI PERMUKIMAN KOTA (Studi kasus Tipologi Permukiman RW 01 RT 02 Kelurahan Limba B dan RW 04 RT 04 Kel)," *Inovasi*, vol. 8, no. September 2011, pp. 102-117, 2011.
- [15] A. N. Ugwu and E. O. Aruma, "Community Participation As a Tool for the Promotion of Sustainable Community

- Development,” *Int. J. Community Coop. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2019.
- [16] O. B. Adegun, “Green Infrastructure Can Improve the Lives of Slum Dwellers in African Cities,” *Front. Sustain. Cities*, vol. 3, no. March, pp. 1–4, 2021.
- [17] P. Bawole, “Neighborhood Development Strategy to Empower Local Community for Tourism Development in Urban Kampong Settlement within Yogyakarta City,” 2019.
- [18] Mayszea Prawika Firdausya, Ed., *Kecamatan Semanu Dalam Angka 2022*. Baleharjo. Wonosari: Balai Pusat Statistik Gunung Kidul.

PENULIS

1. Paulus Bawole

Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta
Wacana Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 – 25,
Yogyakarta 55224 (paulus@staff.ukdw.ac.id)

2. Haryati Sutanto

Fakultas Bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5 – 25, Yogyakarta
55224 (haryati@staff.ukdw.ac.id)